



Pantang Surut Langkah Mencitakan Indonesia Sentris

31

Demi mewujudkan Indonesia sejahtera dan berkeadilan segala hambatan pembangunan akan dihadapi. Bentang geografis dan kekayaan sumber daya menjadi modalitas bagi Indonesia menjadi negara maju. Namun selama ini pembangunan masih terpusat di Pulau Jawa. Pembangunan dengan model Indonesia Sentris menjadi jalan keluarnya. Model itu akan membuat semua wilayah adalah episentrum pembangunan. Gagasan ini didasarkan pada asumsi bahwa setiap wilayah memiliki potensi untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan sosial.

Konsekuensi Indonesia Sentris membawa daerah tertinggal bisa merasakan kue pembangunan. Afirmasi pemerataan pembangunan berupa Proyek Strategis Nasional yang tersebar di seluruh Indonesia menjadi bukti mengatasi ketimpangan wilayah. Ide besar pembangunan yang merata akan membawa dampak berupa pemerataan akses dan transportasi antarwilayah. Capaian penting lainnya adalah naiknya

derajat soal pendidikan dan kesehatan daerah-daerah baru pembangunan. Inovasi dan kreativitas masyarakat yang tumbuh dapat menjadi motor penggerak pembangunan di daerah.

Penciptaan pusat ekonomi baru di luar pulau Jawa menambah peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan. Indonesia Sentris juga harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Partisipasi masyarakat penting untuk memastikan pembangunan sejalan dengan kebutuhannya.

Membangun Ibu Kota Nusantara dari titik tengah republik akan menjadi anjang-ancang agar Indonesia bisa melompat lebih tinggi. Sejumlah perbaikan dilakukan demi membuat Rasio Gini semakin kecil. Upaya mengatasi ketimpangan dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang berserak di seantero negeri.



Supaya si Fakir Tak Lagi **Terpinggir**



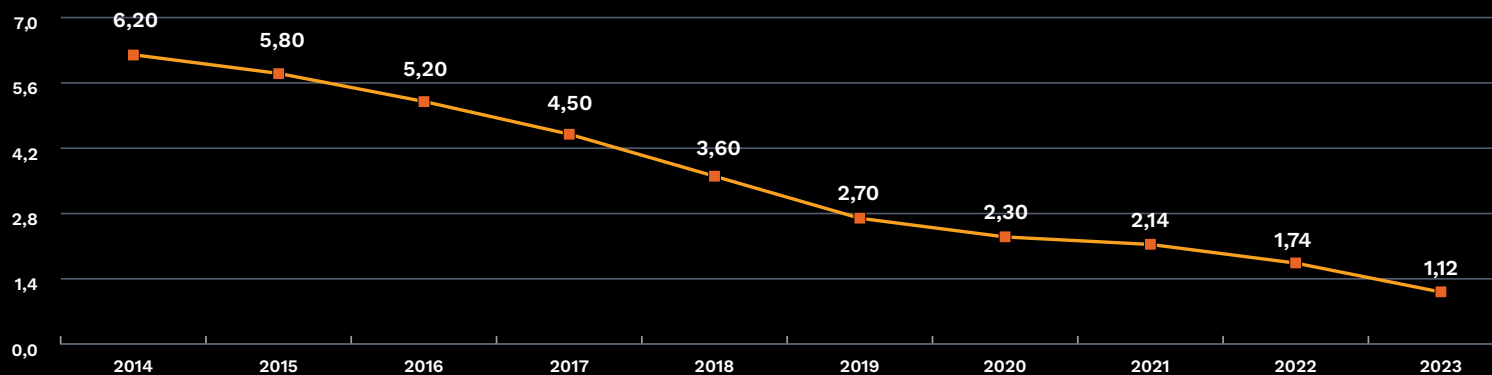
Sumber Foto: Antara

Pemerintah tak pernah abai untuk menggerus angka kemiskinan ekstrem. Target nol persen pada tahun depan terus disertai dengan upaya yang konsisten. Melalui Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, negara *cawe-cawe* agar di tahun 2024 kemiskinan ekstrem hilang di bumi pertiwi.

Impres ini mengamanatkan kepada 22 Kementerian, enam lembaga dan pemerintah daerah untuk melakukan langkah mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem. Hasilnya, pada bulan Maret 2023 angka kemiskinan ekstrem sudah menyentuh angka 1,12% dari total penduduk. Angka ini menurun 0,92 persen dibanding bulan Maret tahun lalu.

Koordinasi para pihak dengan sokongan program yang jitu menjadi kunci sukses turunnya angka kemiskinan. Konsistensi pemberian perlindungan seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, dan Kartu Sembako menjadikan harapan baru Indonesia akan lebih sejahtera pada masa mendatang. Tak luput, peran swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan turut membantu mengangkat kaum papa lepas dari jerat kemiskinan.

Tingkat Kemiskinan Ekstrem (<USD 1,9 PPP) %



Sumber Data: Badan Pusat Statistik

Jaring Penolong Kaum Rentan

Menjaga keselamatan dan mengurangi resiko sosial yang dihadapi perempuan, disabilitas, anak dan orang miskin menjadi tugas negara.

Melindungi kaum perempuan dan anak dari kekerasan seksual ditandai dengan terbitnya UU No. 12 Tahun 2022. Layanan SAPA 129 memberikan ruang masyarakat untuk aktif melaporkan kejadian-kejadian tindak kekerasan pada anak. Saat ini, sudah terintegrasi di 34 Provinsi.

Sedangkan perlindungan sosial lainnya dihadirkan melalui beragam bantuan mulai dari *cash transfer*, bantuan pendampingan, perbaikan permukiman, kesehatan, hingga stimulasi usaha. Itu semua untuk mengurangi beban yang dialami maupun meningkatkan pendapatannya.

Ketepatan sasaran menjadi pekerjaan rumah. Intervensi perbaikan dilakukan menyeluruh meliputi rumusan kebijakan, keterbukaan, peran masyarakat, bahkan sampai menyentuh validitas data yang dijadikan acuan.

Kesulitan semakin nyata, kala pandemi melanda. Kita tidak memiliki satu data. Data tersebar di institusi negara maupun daerah. Data tahun 2015 jumlah penduduk miskin dalam kisaran 92 juta jiwa, *by name by address*, yang kemudian beberapa kali dimutakhirkan. Memang bisa dijadikan base line, namun ketidaktepatan masih nyata terlihat.

Pemerintah memutar strategi cepat. Semua data masyarakat rentan disatukan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Saat ini ada 140 juta jiwa yang sudah padan dengan Nomor Induk Kependudukan. Perbaikan dan pemutakhiran data menjadi langkah strategis, selain perbaikan pada mekanisme perlindungan sosial demi efektifnya menolong si rentan.



Sumber Foto: Antara

Motor Penggerak Lewat Aglomerasi

Menciptakan pusat ekonomi baru menjadi sebuah kebutuhan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan. Pola aglomerasi atau pengelompokan wilayah dipilih, agar pertumbuhan ekonomi daerah terakselerasi dengan baik. Hingga tahun 2023, pemerintah telah menetapkan 20 Kawasan Ekonomi Khusus dengan harapan dapat menarik investasi yang berimbang pada penciptaan lapangan kerja.

Kawasan-kawasan tersebut dipersiapkan untuk memaksimalkan kegiatan industri, ekspor-impor, dan kegiatan lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Dan untuk menarik minat investor, Pemerintah memberikan jaminan berupa ketersediaan infrastruktur telekomunikasi, sumber daya air, transportasi, listrik, gas, dan pasokan tenaga kerja.

KEK Kendal di Jawa Tengah menjadi salah satu cerita sukses pola aglomerasi industri. Terbukti pada Juni 2023, kawasan yang terkonsentrasi di wilayah Kedungsepur ini berhasil mengantongi investasi hampir Rp50 triliun.



Sumber Foto: Dok. Kawasan Ekonomi Khusus Kendal

Presentase Tenaga Kerja Asal Kendal

Total Tenaga Kerja Langsung (Maret 2022)

7.702

Total Tenaga Kerja Langsung Asal Kendal (Maret 2022)

5.938

80%

Dari total tenaga kerja di KIK merupakan warga Kendal dan sekitarnya



Sumber Data: Kendal Industrial Park, Indonesia Sez

Membuat Rakyat Bisa Kerja

Bonus demografi menjadi sabuk pengaman besar yang bisa membawa kita menuju Indonesia Emas. Namun, seperti setiap kisah besar, potensi ini bisa berubah menjadi malapetaka jika kita tidak mempersiapkannya dengan baik. Kunci utamanya adalah bagaimana kita membentuk sumber daya manusia yang berkualitas.

Serangkaian program dan solusi dijalankan untuk menghadapi pengangguran dan mengubahnya menjadi tenaga kerja yang unggul, berdaya saing, dan mampu meningkatkan produktivitas nasional.

Pengembangan keterampilan menjadi fokus utama. Program-program seperti Kartu Prakerja, Pelatihan Berbasis Kompetensi, Pemagangan Dalam Negeri, dan Pengembangan Balai Latihan Kerja Komunitas ditunaikan untuk memberikan

keterampilan yang relevan dengan tuntutan dunia kerja. Selain itu, kurikulum pendidikan vokasional diperbarui agar sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha-Dunia Industri. Salah satunya lewat kebijakan *Super Tax Deduction*.

Upaya menciptakan lapangan kerja juga dilakukan dengan memperbaiki iklim investasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja, dan memperluas sektor-sektor ekonomi baru. Semua langkah ini diambil untuk memastikan setiap warga Indonesia punya kesempatan untuk bekerja dan berkontribusi dalam pembangunan negara.

Meskipun saat ini tingkat pengangguran terbuka masih tinggi, namun dengan segala upaya yang telah dilakukan, harapan untuk menurunkannya bukanlah sekadar mimpi.



Sumber Foto: Antara

Profil Penerima Program Kartu Prakerja

Menganggur sebelum mengikuti program

62%

Dari yang bekerja sebagai wirausaha

40%

Usia 18-35 tahun

69%

Dari wirausaha informal

75%

Berpendidikan SMA ke bawah

87%

Belum pernah mengikuti pelatihan

86%

Pernah putus sekolah

7%

Kepala rumah tangga

30%

Belum pernah bekerja sebelumnya

15%

Dari pekerja yang tidak sesuai dengan latar belakang

63%

Dari pegawai/buruh/karyawan lepas

60%

Median pendapatan per bulan dari yang pekerja

Rp 2 juta

Buruh dengan gaji di bawah UMP

57%

Median omset per bulan dari yang berwirausaha

Rp 1,5 juta

Pekerja informal

65%

Sumber Data: Pelaksana Program Kartu Prakerja (PMO) 2023



37

Sumber Foto: Antara

Indonesia Sentris Bukan Sekedar Angan

Siapa yang tak kenal dengan istilah Indonesia Sentris? Ide orisinil untuk mengubah arah pembangunan bukan hanya di Jawa. Ketimpangan dan kesenjangan diselesaikan dengan pemerataan pembangunan dan penciptaan titik-titik ekonomi baru di luar Jawa.

Kebijakan Indonesia Sentris diwujudkan dalam bentuk peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, hingga kesempatan berusaha. Membangun dari pinggiran, Tol Laut, Tol Langit, Jembatan Udara, Pembangunan Desa,

Pembangunan Perbatasan, Pembangunan Papua hanya sebagian bukti nyata Indonesia Sentris bukan sekedar jargon.

Sokongan ekonomi dari luar Jawa secara perlahan merangkak naik. Kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto mendekati 50% di tahun 2022.

Mewujudkan Mimpi Pemuda Papua

Tak ada kata surut bagi pemerintah membangun Papua. Berbagai beleid diluncurkan untuk mengejar ketertinggalan. Papua harus berkembang dan maju.

Aksesibilitas dibuka dengan ribuan kilometer jalan trans Papua yang terbangun. BBM Satu Harga dijaga. Palapa Ring dimantapkan agar tidak ada lagi *blank spot* komunikasi. Ruang tumbuh dan berkembang bagi talenta Papua juga dihadirkan, salah satunya *Papua Football Academy*. Angka partisipasi sekolah semakin besar yang membuat anak Papua semakin cerdas.

Dan walaupun penuh tantangan, elektrifikasi di Bumi Cendrawasih terus digenjot. Menggunakan inovasi dan solusi energi ramah lingkungan, *energy storage* dibangun agar wilayah pegunungan juga benderang.

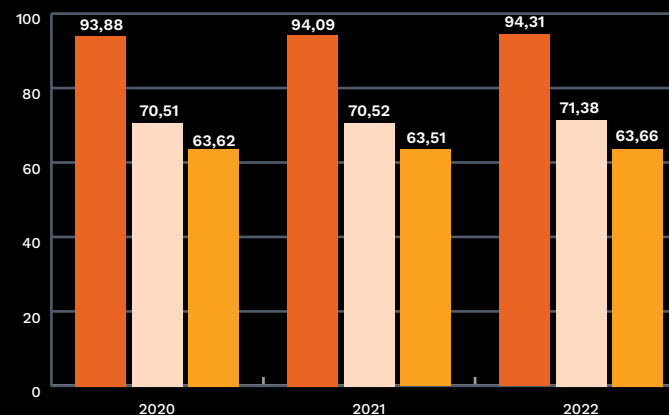
Peta jalan pembangunan makin nyata. Pendekatan kebudayaan menjadi pilihan jitu untuk mewujudkannya. Terbukti dalam satu dekade ini, Indeks Pembangunan Manusia terus merangkak naik. Semua dilakukan demi tiga misi besar: Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif.



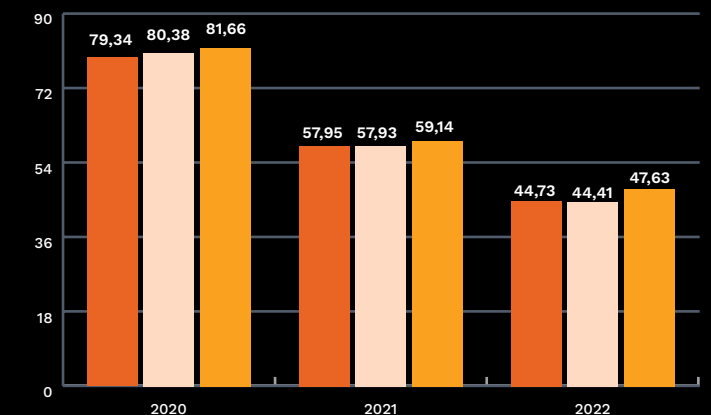
Sumber Foto: Antara

Angka Partisipasi Murni Papua & Papua Barat

Papua Barat



Papua



Sumber Data: Badan Pusat Statistik



Sumber Foto: Antara

Pindah Ibu Kota, Transformasi Indonesia

Gagasan memindahkan ibu kota negara secara permanen telah dimulai tahun 1957 oleh Presiden Soekarno, berlanjut pada pemerintahan berikutnya. Baru pada tahun 2022, tonggak keseriusan Indonesia secara bertahap membangun Ibu Kota Negara Nusantara ditandai dengan terbitnya UU No. 3 Tahun 2022.

Pindah ibu kota adalah pindah cara kerja, pindah *mindset* dengan berbasis pada ekonomi modern dan membangun kehidupan sosial yang lebih adil dan inklusif. Kota hutan pilihan mewujudkannya.

Kebun persemaian skala besar Mentawir dihadirkan. Kapasitas 15 juta bibit per tahun disiapkan untuk menghutankan IKN.

IKN adalah *showcase* transformasi, baik di bidang lingkungan, cara kerja, basis ekonomi, teknologi, dan lain-lainnya, termasuk di bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan yang lebih berkualitas.

Tahapan Pembangunan Ibu Kota Baru



Sumber Data: Otorita Ibukota Nusantara

Ikhtiar Desa

Merdesa



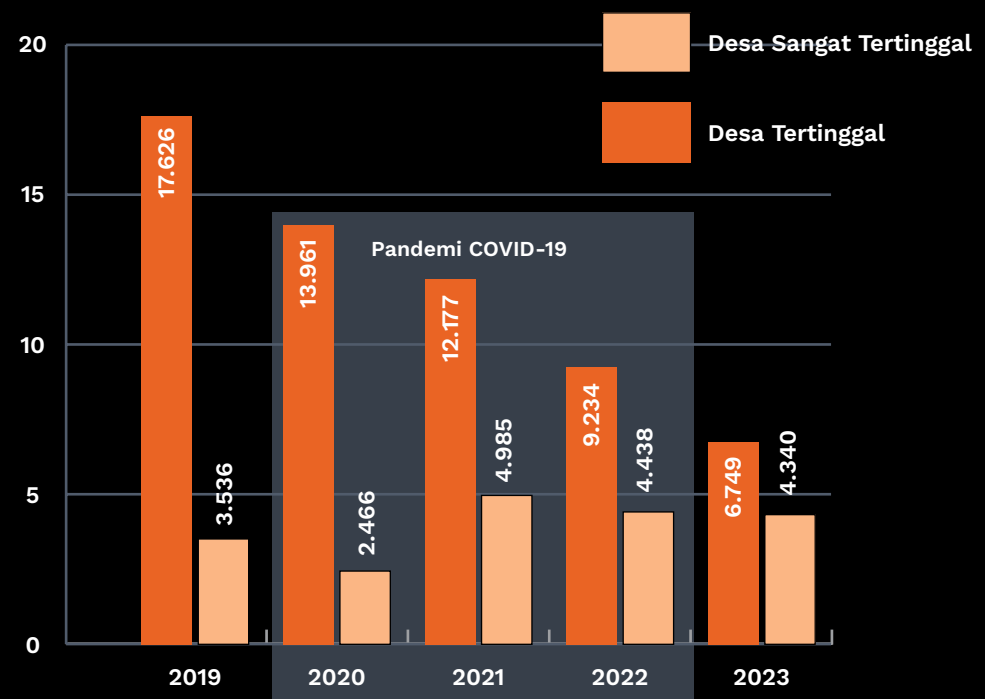
Sumber Foto: Antara

Merdesa memang sebuah kata tak lazim di zaman sekarang. Para leluhur mengartikannya sebagai tempat hidup yang layak. Merdesa juga bisa diartikan sebagai upaya untuk mewujudkan desa yang mandiri, berdaya, dan sejahtera. Mimpi menjadi desa yang merdesa diwujudkan dalam 9 tahun terakhir, sejak Undang-undang tentang Desa ditandatangani.

Beleid ini mengubah pola. Desalah yang menentukan apa yang dibutuhkan. Bukan lagi obyek, melainkan subyek pembangunan. Angin perubahan ini membawa semangat baru untuk menggali potensi dan mencipta inovasi pengelolaan desa. Terbukti, angka kemiskinan menyusut.

Peningkatan APBDes telah memberikan manfaat yang besar berupa infrastruktur desa yang membaik. Selain itu warga desa juga semakin berdaya dari sisi kesehatan, ekonomi dan pendidikan. Munculnya desa sebagai sentra wisata, pertanian, dan industri semakin menebalkan semangat desa bukan lagi terpinggirkan. Jumlah desa tertinggal mengalami penurunan drastis dari 17.626 menjadi 6.749 desa. Ujian saat pandemi pun bisa terlewati dengan mulus. Kala masyarakat kota kebingungan akan akses pangan, desa justru berdikari.

Indeks Desa Membangun



Sumber Data: Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

Bukan Sekedar Polesan



Sumber Foto: Antara

Pangkas kesenjangan antara kota dan pinggiran. Niat mulia ini bermula saat denyut nadi pembangunan belum terasa lancar mengalir hingga kawasan tertinggal, terdepan dan terluar. Listrik masih *byar pet*, bahkan padam seharian. Puskesmas tidak terisi tenaga medis. Demikian pula harga BBM yang sangat mahal. Wajah muram serasa tak punya masa depan terlihat di depan mata.

Tinta merah diganti tinta biru pencapaian. Di awal tahun 2015 masih ada 122 daerah tertinggal, kemudian berkurang tinggal 62 akhir tahun 2020. Tahun ini, diperkirakan akan berkurang sejumlah 23 Kabupaten lagi yang akan lepas dari kategori daerah tertinggal.

Pembangunan daerah pinggiran bukan hanya penegasan pada anggaran dan kegiatan pembangunan. Bukan sekedar polesan di permukaan, namun pendekatan yang lengkap. Pembangunan manusia dari sisi pendidikan dan pemberdayaan masyarakat jadi syarat mutlak.

Peran warga yang aktif dalam membangun daerahnya sendiri menjadi resep paling mujarab demi mewujudkan Indonesia yang adil dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya.

Ulik Taktik, Atasi Kesenjangan Infrastruktur

Daya saing membaik, kala infrastruktur juga baik dan terintegrasi. Jalan tol tak tersambung, bandara dan pelabuhan semrawut, membuat pergerakan barang serta orang terhambat. Konektivitas tidak ada. Biaya logistik jadi mahal. Pertumbuhan mandeg.

Ada banyak kendala yang dulu dihadapi. Mulai dari lambatnya perizinan, keterbatasan lahan, tumpang tindih peraturan, hingga ketersediaan biaya.

Mengulik siasat dilakukan agar infrastruktur segera terbangun. Proyek Strategis Nasional-lah pilihannya. Semua demi pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat. Sampai dengan tahun Oktober 2023 terdapat 170 Proyek Strategis Nasional yang telah diselesaikan. Sebagian besar ada di luar Jawa.

Kendala pembiayaan diatasi dengan melibatkan swasta. Tentu saja, APBN/APBD tetap menjadi sumber utamanya. Semua diatur sesuai dengan resiko dan level kerumitan yang berbeda-beda.

Sumber Foto: Antara

Koneksi Melejit Tol Langit



Menembus keterisolasian masyarakat pinggiran tidak hanya dengan membuka jalan. Akses informasi dan komunikasi yang mumpuni juga menjadi faktor vital untuk memajukan Indonesia. Serat optik dijadikan pemain kunci menghadirkan keterhubungan korespondensi di pelosok negeri. Palapa Ring adalah tulang punggungnya.

Ini bukan proyek seketika. Gagasan menyambungkan komunikasi via satelit sudah muncul sejak akhir tahun 90an. Namun sayang, hal tersebut tidak segera terwujud. Baru pada 2016, Palapa Ring dibangkitkan lagi. Dalam 3 tahun, 12.300 kilometer serat terhubung.

Tol langit sudah terbangun. Mengintegrasikan dengan jaringan lainnya dan menyediakan Base Transceiver Station (BTS) agar pemerintah bisa melayani rakyatnya semakin baik.

Perlu lompatan kebijakan agar segera bisa melayani pinggiran negeri, karena butuh waktu 10-20 tahun lagi baru terhubung. Satelit SATRIA-1 memotong waktu tunggu, targetnya akhir tahun 2023, sudah bisa melayani 20 sampai 30 ribu titik layanan publik di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Tulang punggung terhubungnya komunikasi seluruh negeri sudah tersemai.

Sumber Foto: Antara

Rakyatlah Pemain Utamanya

Rakyat pun bisa membangun infrastruktur. Dari merencanakan, membangunnya dan memanfaatkannya. Energi besar rakyat Indonesia saat membangun Infrastruktur berbasis masyarakat.

Program penyediaan air minum berbasis masyarakat (Pamsimas) dan sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas) ada 37.000 bisa melayani 25,9 juta masyarakat.











Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) mampu meningkatkan kualitas hunian masyarakat sejumlah 93.139 unit.

Dana Desa juga dijalankan sendiri oleh rakyat, contohnya untuk membangun 326.395 Km jalan desa, 1 juta lebih air bersih, 25.713 polindes. Semangat gotong royong membangun negeri mengukuhkan rakyat sebagai pemain utamanya



Sumber Foto: Antara

Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2015 - 2023

 Jalan Desa 326.395 Kilometer	 Sarana Olah Raga 32.059 Unit
 Jembatan 1.797.078 Meter	 Air Bersih 1.671.455 Unit
 Pasar Desa 14.168 Unit	 MCK 514.065 Unit
 BUM Desa 42.761 Unit Kegiatan	 POLINDES 25.713 Unit
 Tambatan Perahu 8.881 Unit	 Drainase 50.355.642 Meter
 Embung 6.432 Unit	 PAUD 68.507 Kegiatan
 Irigasi 573.409 Unit	 Posyandu 43.774 Unit
 Penahan Tanah 532.456 Unit	 Sumur 87.070 Unit

Sumber Data: Kementerian Desa

Transformasi Moda Transportasi

Perlahan wajah transportasi kita berubah dan berbenah menuju peradaban transportasi maju seperti di negara-negara besar dunia. Integrasi antar moda tak lagi menjadi mimpi. Kehadiran Kereta Bandara, KRL, MRT, LRT, BRT, hingga Kereta Cepat Jakarta-Bandung, menjadi bukti.

45 Tak hanya integrasi fisik. Sistem pembayaran juga menjadi terpadu dan lebih mudah. Bukan hanya budaya non tunai yang hadir, tapi juga digitalisasi tanpa sentuhan. Pada waktunya, masyarakat tak perlu lagi membawa dompet dalam bepergian, hanya sebuah kartu atau telepon genggam.

Transformasi moda transportasi beserta aturan barunya ini membuat masyarakat mulai berpindah ke angkutan publik. Di beberapa daerah, jumlah pengguna angkutan umum seperti LRT juga meningkat. Sumatera Selatan misalnya, pengguna LRT saat ini telah mencapai tiga juta lebih. Kondisi yang sama juga terjadi di Jakarta, di mana penumpang MRT sudah lebih dari 80 juta pengguna. Ini wujud dari kita sedang mentransformasikan budaya angkutan publik yang lebih baik.



Sumber Foto: Antara

Peta Sebaran Jembatan Udara 2023

